



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2, Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompak,
Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dpmptspkepri20@gmail.com Laman : dpmptsp.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 003 /C4.b/DPMPTSP/I/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 119/1L.2/DPMPTSP/III/2021 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
GLOBE NATIONAL PLUS

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan nama Sekolah Menengah Atas Swasta Globe National Plus, Ketua Yayasan Bumi Cemerlang mengajukan permohonan perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat nomor 225/S.Pm/GIS/XI/2025 tanggal 17 November 2025 hal Permohonan Perubahan Nama Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/400.3.8/35/DISDIK/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Rekomendasi Perubahan Nama Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 119/1L.2/DPMPTSP/III/2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Globe National Plus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 119/1L.2/DPMPTSP/III/2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Globe National Plus.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicantumkan dalam data sebagai berikut:
1. Nama Yayasan : Yayasan Bumi Cemerlang
 2. Nama Ketua : Mahmudi Arif Dahlan, S.Th.I, M.Pd Yayasan
 3. Nama Sekolah : SMAS Globe Islamic School
 4. Alamat Sekolah : Komplek Green Garden Blok C No.16, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA** : Ketentuan lain dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 119/1L.2/DPMPTSP/III/2021 yang tidak diubah dengan Keputusan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Januari 2026

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196903291990031009

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam Center.